

Laporan Webinar Watch65 - 4 Oktober 2020

## MEMBAHAS KARYA JOHN ROOSA 'BURIED HISTORIES'

Moderator: Ratna Saptari; Pembicara: John Roosa; Pembahas: Grace Leksana dan Baskara Wardaya; Peserta: 85 orang

**John Roosa**, pengajar sejarah di University of British Columbia, Canada, lebih dari 20 tahun mewawancarai eks-tapol. Dia mengemukakan banyak pertanyaan penting belum terjawab berkenaan dengan pembantaian Peristiwa G30S/Gestok. Pembantaian massa kini menjadi lebih penting daripada G30S itu sendiri yang sudah dibahas di buku \*Pretext for Mass Murder The September 30th Movement and Suharto's coup d'etat in Indonesia.\*

Pertama: bagaimana pembunuhan massal terjadi, para eks-tapol tidak bisa menceritakannya atas dasar pengalaman sendiri, juga keluarga yang ditinggal pun tidak bisa menceritakannya. Dari data yang terkumpul selama puluhan tahun, akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa di banyak tempat pembunuhan massal mengikuti pola tertentu yang sama. Korban dijemput paksa, dari rumahnya atau dari penjara (setelah sebelumnya ditahan), kemudian pada malam hari dengan truk dan dibawa ke tempat yang sepi. Di tempat itulah mereka diturunkan dari truk, ditembak mati, tubuh mereka adakalanya dibuang ke sungai atau ke lubang kubur yang sudah digali sebelumnya. Pembunuhan yang demikian tidak bisa disebut sekedar 'pembunuhan' saja, melainkan adalah juga penghilangan paksa. Jadi intinya – juga bagi keluarga yang ditinggal – yang terjadi adalah penghilangan paksa.

Buku *Buried Histories* (selanjutnya disebut BH) ini menceritakan kisah-kisah korban dan penyintas dengan sedemikian rupa, sehingga pembaca dapat *merasakan* kepiluan dan penderitaan mereka. Disini penulis bukan sekadar penulis yang membahas peristiwa, melainkan berupaya menghadirkan dirinya dalam mendeskripsikan tragedi kemanusiaan ini. Dan untuk memperoleh informasi semacam ini, diperlukan pendekatan tersendiri. Karena penghilangan paksa – pola yang diterapkan tentara dengan maksud untuk menutup-nutupi realitas - sulit sekali diperoleh datanya.

Kedua, bagaimana mungkin korban begitu gampang digiring ke tempat pembunuhan tanpa melawan. Ada sedikit perlawanan pada mulanya di beberapa tempat. Bagaimana bisa terjadi sekian banyaknya orang tak bersenjata dan tak berdaya dilenyapkan dan dibunuh dalam waktu relatif singkat?

1. Perlu dicatat bahwa penghilangan dan pembunuhan itu dilakukan atas keputusan para perwira militer. Dan militer juga yang menguasai semua rumah tahanan. Ini jelas suatu keputusan, bukan suatu kebetulan. Untuk memahaminya, cerita pelaku juga penting. Contohnya di Palembang: sedikit sekali cerita tentang pembunuhan di sana, tetapi di dalam biografi Taufik Kiemas terdapat kesaksian pelaku.

2. Guna menggerakkan motivasi orang untuk membunuh, diciptakan fantasi, mitos, propaganda mengenai kejahatan PKI, yang sekaligus menjadi pembenaran pembantaian. Pola ini terjadi pada semua genosida, di mana pun: berbohong untuk menghasut agar tercipta pembenaran bagi pembantaian terhadap kelompok orang yang tidak berdaya, secara massal.

3. Tiadanya perlawanan dari korban ketika digiring adalah umumnya karena mereka percaya akan dilindungi dari amarah dan agresi massa. Motif korban: setia kepada negara

atau kepada Soekarno. Di masa itu memang banyak pula tentara dan polisi yang berpihak pada PKI dan kelompok kiri

## PEMBAHASAN

**GraceLeksana** menyambut buku ini dan menilai John telah berhasil mengangkat kisah-kisah pembantaian pada tingkat individual, dalam konteks masing-masing, dalam keunikan setiap lokalitas. John telah memilih kasus-kasus yang menarik dan menuliskan dengan cara yang memikat, juga bagaimana kasus-kasus tersebut diingat (memorialisasi). Contohnya, di Bali kisah pelukis dan pemusik yang dibuatkan patung-patung pemusik kelompok Legong di desanya. Sekaligus John berhasil menganalisa pola kekerasan yang terjadi, dan mengapa terjadi demikian di pelbagai daerah yang berbeda.

1. Di dalam studi-studi genosida umumnya fokus tertuju pada pelaku dan korban. Tetapi John menggambarkan konfigurasi sosial yang jauh lebih kompleks, yang mengedepankan juga peran *resisters*, mereka yang mencoba menghalangi pembunuhan dan kekejaman lainnya. Banyak penentang ini bukan dari kubu PKI, ada yang dari kelompok agama, pamong desa, atau dari tentara sendiri.
2. Studi BH menunjukkan pada umumnya interogasi dilakukan bukan untuk memperoleh informasi (yang bisa dipertanyakan kebenarannya karena dilakukan dengan penyiksaan) melainkan untuk memaksakan keluarnya informasi yang menopang narasi resmi tentang genosida yang berlangsung.
3. Sebuah kelompok sebagai sasaran pembantaian adalah buruh atau kelas pekerja seperti dalam kisah-kisah dari Sumatra. Kelas ini yang adakalanya terlindung karena dibutuhkan oleh kapitalis, tapi dalam hal ini disikat habis karena dia merupakan kekuatan yang terorganisir.
4. Arsip yang digunakan John, misalnya koran militer Berita Yudha, tidak hanya digunakan untuk menganalisa propaganda publik. Tapi sumber arsip tersebut juga digunakan untuk memperlihatkan subyektivitas pelaku. Arsip ini menjadi jendela untuk melihat bagaimana mereka membicarakan tindakannya sendiri, melihat kebohongan dan fakta-fakta yang dilebih-lebihkan

Halnya Grace, Romo **Baskara T. Wardaya** menyambut baik buku BH.

1. Dengan menempatkannya sebagai karya akademis, dalam lingkungannya ditempatkan di jajaran diantara buku Geoffrey Robinson (Indonesia secara menyeluruh) dan Jess Melvin (Aceh), maka buku ini merupakan dorongan untuk meneliti lebih lanjut kekerasan 1965-66 di berbagai daerah.

1. Sejak dulu Baskara melihat pentingnya *agency* (peran) dari *resisters*, di tingkat regional dan lokal, seperti peran Gubernur Sutedja di Bali dan Pangdam Jawa Barat Ibrahim Adjie.
2. Penekanan kepada aspek penghilangan paksa amat penting, agar orang lebih mengerti pengalaman korban dan keluarganya. Tapi yang membuat terharu benar adalah dimensi kemanusiaan yang begitu besar dalam BH ini. Baskara menyebut kisah I Gusti Nyoman Gede dan putranya dan kisah Ni Made Intaran.
3. Yang juga menarik adalah nuansa dikotomi pelaku dan korban, yang membuahkan istilah *survivor* atau penyintas. Dalam konteks ini bisa kita tempatkan peran *resisters*, tapi juga adanya sebuah zona kelabu, di mana seorang pelaku bisa menjadi korban atau sebaliknya. Di dalam BH ada kisah seorang yang pindah dari Jawa ke Sumatra untuk mencari kehidupan yang lebih baik, akhirnya bergabung jadi tentara bahkan dipaksakan turut dalam proses pembunuhan, namun akhirnya, negara

konflik intern dilaporkan sebagai “terlibat PKI” dan dipenjarakan tanpa proses hukum selama 9 tahun. Kisah-kisah perorangan inilah yang memperlihatkan betapa kompleksnya Tragedi 1965 itu, yang tidak selamanya hitam putih. Yang penting dari BH ini: penulis sendiri selalu berada di dalam ceritanya.

John terkesan dengan tanggapan Grace dan Baskara, yang memperlihatkan bahwa alur cerita dan argumentasi di dalam BH ditangkap dengan baik. Dalam bukunya, dia memang perlu menjelaskan dari mana kisah-kisah itu, kapan wawancara dilakukan dll.

Sesungguhnya setiap orang yang diwawancarai itu patut dituliskan riwayatnya. Banyak riwayat yang sangat menarik. Tentu ini tidak mungkin tertampung di dalam buku. John mempunyai rencana untuk suatu hari bersama Ayu membukukan semua kisah itu. Tidak hanya riwayat perorangan terpaksa disingkat, juga analisis di berbagai bab di dalam BH hanya ringkas. Misalnya ulasan tentang PKI sebagai organisasi gramscian. Ini membutuhkan elaborasi.

John juga senang dengan tanggapan yang positif tentang penyorotan peran \*resisters.\* Banyak yang berupaya keras untuk menghindari kekejaman terjadi. Banyak *resisters* itu Soekarno. Mereka itu berada di tingkat lokal sampai nasional dan dari berbagai sektor (pemerintah, nasionalis, kelompok agama, militer dll). Ada yang secara terbuka mengatakan tidak suka dilakukannya pembunuhan orang sipil dan menganjurkan agar pembunuhan segera dihentikan.

Apa yang terjadi pada 1965-66 tersebut, jelas tidak wajar dan tidak manusiawi. Suara-suara kritis ini jarang disorot. Ditambah dengan pembungkaman yang terjadi, bahkan timbul kesan di luar negeri, orang Indonesia ini “kelewat kejam”. Padahal pembantaian dan kekerasan 1965-66 itu tidak banyak berbeda dari semua genosida yang terjadi di manapun di dunia.

## DISKUSI

DISKUSI berlangsung dalam tiga bagian. Pertanyaan mengenai peristiwa G30S/Gestok, seputar tindakan Letkol Untung dan pasukan Cakrabirawa tidak dilayani karena kurangnya waktu dan karena hal itu adalah tema buku *Pretext*, bukan di BH. Ada yang mengungkapkan keheranan mengapa PKI tidak melawan ketika para anggota dan simpatisan diserang, bukankah organisasi mereka itu kuat?

John menunjuk kepada bab ke-4 BH. Di situ diceritakan apa yang terjadi, justru pada salah satu daerah dimana PKI kuat yaitu Jawa Tengah. Di tempat ini terjadi *surprise attacks* oleh RPKAD dan milisi: situasi tegang, banyak yang diteror, yang diserang tidak siap atau tidak dalam posisi untuk melawan. Sebagai organisasi, PKI sudah runtuh. Di Solo pada 1966 pernah terjadi rencana aksi untuk melarikan diri dari penjara, ada tentara yang mau bantu, namun tidak berhasil.

Salah satu peserta meminta penjelasan lebih lanjut mengenai relasi tokoh-tokoh agama dan PKI sebagaimana disebut di dalam BH. Yang dimaksud adalah tokoh-tokoh seperti Haji Misbach dan dua orang yang sangat dekat dengannya, yaitu Harun Rasyid dan Ahmad Dasuki.

Penting dicatat bahwa komunisme di Hindia Belanda berawal dari gerakan Islam yang antikolonial, yang bisa dianggap sayap kiri di dalam Sarekat Islam. Sebagai pusat gerakan ini, Jawa Tengah adalah daerah tempat budaya sintesis antara komunisme/sosialisme dan Islam sangat kental. Mereka menganut tafsir bahwa Islam adalah agama yang mendukung kaum miskin. Banyak cerita orang-orang yang terlibat di dalamnya sudah hilang. Rasyid dan Dasuki masih hidup dan giat padatahun 1965.

Kemudian muncul pertanyaan lain, yakni sejauhmana sebelum 1965, PKI melakukan pembunuhan. Dalam jawabannya, John mengambil periode mulai 1948. Dalam periode 1948-1965 PKI tidak berada dalam posisi untuk membunuh. PKI memilih posisi sebagai partai resmi yang medan geraknya ditentukan oleh aturan demokrasi. Yang memberontak justru pihak berseberangan, yaitu DI (Darul Islam) dan pemberontak PRRI/Permesta. Mereka yang melakukan pembunuhan.

Betul, demikian menurut John, kubu-kubu kanan ini sering menggambarkan PKI sebagai organisasi yang sangat berkuasa dan mampu membunuh, padahal itu tidak benar. Bahkan pada 1948 pun, dalam Peristiwa Madiun, kekerasan datang dari kedua pihak (PKI dan Masyumi), dan setelah pasukan Sukarno-Hatta masuk, baru banyak yang dibunuh dan PKI malah kalah. Gambaran yang keliru tentang kekuatan dan peran PKI perlu sekali diluruskan. Di periode 1948-1965 PKI adalah partai mapan, diantara anggotanya banyak bupati, lurah dll. Lihatlah *track record* (rekam-jejak) mereka.

Beberapa peserta mengangkat isu rekonsiliasi dan apa yang seharusnya dilakukan negara. John menunjuk perlunya ratifikasi konvensi tentang penghilangan paksa (*Convention on Involuntary Disappearances*), yang oleh pemerintah RI baru ditandatangani saja. Ratifikasi akan memberi dasar hukum bagi bantuan negara kepada upaya pencarian info/data tentang mereka yang dihilangkan dan penggalian kuburan massal. Ini langkah pertama yang bisa dilakukan negara.

Terkait isu di atas, muncul pertanyaan bagaimana negara bisa membantu penyintas, Baskara melihat bahwa negara selama ini diam, kecuali Gus Dur yang pernah berupaya melakukan sesuatu namun gagal. *Where the state is silent*, halnya Indonesia, maka masyarakat sipil harus mengambil inisiatif.

Sesungguhnya negara harus memfasilitasi inisiatif seperti itu dan minimal menciptakan suasana yang tidak diwarnai ketakutan. Seraya menunggu, sebaiknya dikerjakan apa yang bisa dikerjakan. Dan memang sudah banyak yang berlangsung. Baskara menyebut beberapa contoh antara lain Pipit Ambarmirah dengan Kiper. "Marilah kita sebagai bangsa duduk bersama dan belajar sejarah baik dari informasi yang sudah diketahui maupun yang masih terkubur."

Pada akhir diskusi, Baskara menanggapi pertanyaan tentang model rekonsiliasi yang sebaiknya ditempuh. Menurutnya, hal ini agak sulit ditentukan karena rekonsiliasi harus disesuaikan pada konteks sejarah masing-masing negara. Misalnya, model Jerman atau model Afrika Selatan?

Satu kenyataan yang menyulitkan bagi Indonesia adalah bahwa setelah pembantaian para pelaku masih berkuasa secara politik selama 32 tahun. Ini berarti narasi yang diciptakan untuk membenarkan pembantaian tersebut, yang sudah sedemikian 'mendarah daging' itu, harus dipatahkan lebih dulu.

Seorang peserta menanyakan sejauh mana di Papua juga terjadi kekerasan pada 1965-66. John menjawab tidak banyak data tentang itu, tetapi setuju dia penahanan dan pembunuhan PKI tidak begitu menonjol di sana. Ini bisa dimengerti karena pada tahun 1965, Papua baru menjadi bagian dari Indonesia, tentara baru saja selesai dengan Operasi Trikora dan PKI belum terbangun disana. Ada peserta menyebutkan kasus relawan Gerwani dari Jawa yang mengajar di Papua, ditangkap, dibawa pulang ke Jawa dan dipenjarakan. Seorang peserta berkomentar tentang infrastruktur militer dengan *territorial command* (Koter: Komando Territorial). Indonesia satu-satunya negara yang memiliki infrastruktur militer demikian. Bukankah infrastruktur ini dari atas hingga ke bawah (Kodam-Korem-Kodim-Koramil) merupakan benteng yang kuat untuk pelaksanaan pembunuhan politik, termasuk penghilangan paksa, juga di masa akan datang? Dengan kata lain, ini infrastruktur yang memudahkan pelaksanaan genosida.

John setuju. Beberapa kali pernah muncul usul untuk menghapus dan mengganti struktur ini, yaitu di masa pemerintahan Gus Dur dan belum lama berselang oleh Agus Widjojo. Tapi benteng keras ini tidak berhasil diterobos. "Selama ada Koter, demokrasi tidak bisa dibangun" demikian John. "Lihat saja nasib Jokowi sekarang, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sebetulnya Koter ini menghancurkan pemerintahan sipil. Di pihak lain, dalam prakteknya infrastruktur itu adakalanya tidak sama kokohnya di semua tempat. Di masa 1965-66 militer bertanggung-jawab akhir atas pembantaian yang terjadi, tapi dalam prakteknya ada beberapa daerah di mana tanggung jawab itu tidak total, khususnya di mana ada penolakan di kalangan tentara untuk membunuh orang kiri dan PKI. Jadi di situ tergantung posisi masing-masing komandan"

Ada yang mengingatkan John tentang peran Iskandar Subekti, yang disebut di buku ini tetapi tidak di buku *Pretext*. Menurut dia lebih banyak data tersedia mengenai sosok ini yang patut dipublikasikan. John menyatakan terima kasih atas usul itu.

Akhirnya ada beberapa pertanyaan soal pendidikan dan pelajaran sejarah. Sejauh mana penting untuk menyampaikan kepada murid info pembantaian 1965-66 dari sisi kemanusiaan. Grace berpendapat di buku sejarah formal pengetahuan samasekali tidak lengkap. Tetapi dalam praktek murid menangkap banyak dari media sosial. Dan Buku BH, baik sekali sebagai materi bahan pelajaran sejarah di sekolah. Di samping itu, penting untuk menggunakan pengetahuan sejarah ini untuk menganalisis situasi kini. Yang berlaku bagi orang muda di Indonesia, berlaku pula bagi generasi ketiga, anak-anak para eksil '65 di luar negeri, seperti di Belanda.

Baskara mengingatkan kembali apa yang dikemukakan John, yaitu keinginan John dan Ayu mengumpulkan riwayat-riwayat perorangan korban dan penyintas 1965. Semacam koleksi biografi. Adalah penting bila masyarakat mendengar kisah hidup orang-orang yang serupa dengan mereka.

(Laporan : Artien & Tossi; desain poster: Koeskomo)